

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi *Underground Economy*

Berkaitan dengan definisi *underground economy*, sampai saat ini belum terdapat kepastian di antara para ahli ekonomi. Dalam sejumlah literatur dijumpai beberapa definisi yang berbeda. Perbedaan definisi tersebut tergantung dari objek dan pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengidentifikasi aktivitas ekonomi. Faal, (2003) misalnya mendefinisikan *underground economy* sebagai kegiatan memproduksi barang dan jasa atas dasar harga pasar (*market-based production*) baik yang legal maupun illegal, namun kegiatan tersebut tidak tercatat, atau tidak dilaporkan dalam statistik sehingga luput dari penghitungan PDB resmi (*official GDP*).

Definisi *underground economy* menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercermin dalam kegiatan sektor informal yaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku yang: (i) bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain; (ii) bekerja dibantu pekerja keluarga dan karyawan tidak tetap; dan (iii) merupakan pekerja bebas pada sektor pertanian dan luar pertanian. Sedangkan Tanzi, (2002) mendefinisikan *underground economy* sebagai penghasilan yang didapat dari kegiatan ekonomi yang tidak terekam dan atau tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak, beban pajak merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan *underground economy*. Lebih lanjut Amalia *et al.*, (2020) memberikan definisi *underground economy* berdasarkan klasifikasi kegiatan dan transaksi, ia

mengklasifikasikan pendapatan dari produksi barang-barang dan jasa-jasa legal yang tidak dilaporkan baik yang bersumber dari transaksi moneter dan non-moneter (barter) sebagai *underground economy*. Artinya, definisi ini juga mencakup bagaimana kegiatan ekonomi yang secara umum dapat dikenakan pajak namun tidak dilaporkan terhadap otoritas pajak.

Samuda, (2016) mencoba mengelompokkan *underground economy* ke dalam empat golongan yaitu:

- 1) *The illegal economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak sah yang memasukkan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan (undang-undang), seperti jual-beli barang-barang hasil curian, pembajakan, penyelundupan, perjudian, dan transaksi-transaksi obat bius dan narkoba.
- 2) *The unreported economy*, yaitu pendapatan yang tidak dilaporkan, khususnya kepada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar pajak.
- 3) *The unrecorded economy*, yaitu pendapatan yang seharusnya terekam dalam statistik dalam pemerintah tapi tidak terekam atau tercatat, akibatnya terjadi perbedaan antar jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang sesungguhnya.
- 4) *The informal economy*, yaitu pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang, tidak

memiliki perjanjian kerja, atau kredit keuangan.

2.2. Penyebab *Underground Economy*

Menurut Schneider & Hametner, (2007) ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas *underground economy*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beban pajak dan jaminan sosial (*social security*). Beban pajak dan jaminan sosial adalah faktor utama yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan kegiatan *underground economy*. Beban pajak yang semakin besar, akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Selain itu, apabila perbedaan antara total biaya tenaga kerja dalam ekonomi resmi (*official economy*) dengan pendapatan setelah pajak yang diperoleh dari bekerja semakin besar, semakin besar insentif pekerja untuk bekerja dalam *underground economy*. Namun demikian, reformasi pajak besar-besaran sekalipun, misalnya melalui penurunan tarif pajak, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya kegiatan *underground economy* secara substansial. Reformasi bisa menstabilisasi ukuran *underground economy* dan mencegah peningkatan lebih lanjut. Akan tetapi, jaringan sosial dan hubungan personal, keuntungan yang tinggi dari kegiatan yang tidak lazim serta investasi riil dan sumber daya manusia bisa mencegah masyarakat kembali beraktivitas dalam *official economy*.
- 2) Peningkatan intensitas regulasi pemerintah, yang seringkali diukur dengan jumlah undang-undang dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan faktor penting yang dianggap menambah biaya dan mengurangi kebebasan individu untuk terlibat dalam ekonomi formal (*official economy*).

Misalnya, regulasi pasar tenaga kerja, hambatan perdagangan (*trade barriers*), restriksi penggunaan tenaga kerja asing, dan hambatan-hambatan untuk memasuki (*barriers to entry*) sektor formal. Regulasi yang semakin banyak akan membuat birokrasi berbelit-belit dan meningkatkan beban para pelaku ekonomi. Semakin besar beban tersebut maka menjadi semakin tidak ekonomis, sehingga dapat menjadi penyebab pelaku ekonomi memilih bekerja dalam *underground economy*.

- 3) Pelayanan sektor publik. Peningkatan aktivitas *underground economy* bisa menyebabkan turunnya penerimaan negara, yang pada gilirannya mengurangi kualitas dan kuantitas penyediaan barang-barang dan jasa publik. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan meningkatnya tarif pajak untuk perusahaan dan individu di sektor-sektor resmi. Tidak jarang kondisi ini dibarengi dengan memburuknya kualitas barang-barang publik (seperti infrastruktur) dan administrasi, dengan konsekuensi semakin kuatnya insentif untuk terlibat dalam kegiatan *underground economy*.
- 4) Kegiatan ekonomi resmi (*official economy*). Kondisi ekonomi resmi juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk bekerja pada *underground economy*. Dalam kondisi ekspansi ekonomi, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan uang tambahan lainnya. Sebaliknya dalam kondisi resesi ekonomi, para pelaku ekonomi berusaha mengkompensasi kehilangan pendapatan dari ekonomi resmi dengan melakukan kegiatan tambahan pada *underground economy*.

2.3. Efek *Underground Economy*

Menurut Nizar & Purnomo, (2011) ada beberapa konsekuensi yang serius yang mungkin muncul akibat perkembangan kegiatan *underground economy*, yaitu:

- 1) Penghindaran pajak (*tax evasion*) yang disebabkan oleh tarif pajak yang tinggiakan menggerus penerimaan, sehingga sulit mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh tarif pajak dan *enforcement*, karena itu pilihan kebijakan pajak juga ditentukan oleh bentuk *enforcement* yang diberlakukan.
- 2) Peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan *underground economy* merepresentasikan suatu bentuk “subsidi” untuk aktivitas ekonomi tertentu karena mudahnya melakukan penghindaran pajak. Hal ini seringkali menurunkan produktivitas perekonomian.
- 3) *Underground economy* menyebabkan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi menjadi kurang konsisten (*unreliable*), dan informasi ini bisa menyebabkan keputusan kebijakan ekonomi yang tidak tepat.
- 4) Dari sisi mikro, *underground economy* membuat kondisi persaingan tidak sehat di sektor tersebut dan tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah dan tidak membayar pajak, karena itu tingkat harga dapat lebih rendah dibandingkan *official economy* sehingga mampu meningkatkan penjualan dan menambah keuntungan. Semakin besar *underground economy* maka semakin besar potensi pajak yang hilang, hal tersebut berarti memperkecil penerimaan pemerintah dari pajak dan akan mengurangi

investasi infrastruktur di sektor publik yang merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, misalnya dengan menaikkan tarif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak maka yang terjadi adalah *underground economy* akan semakin besar dan penerimaan pemerintah tidak akan bertambah secara signifikan.

Semua isu kebijakan di atas berkaitan dengan dampak negatif dari *underground economy*. Walaupun begitu, menurut Nizar & Purnomo, (2011) kegiatan *underground economy* juga memiliki beberapa dampak positif antara lain, pemerintah kadangkala mengeluarkan regulasi tentang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan tidak efisien, munculnya *underground economy* adalah karena pembeli dan penjual tidak bisa melakukan pertukaran secara legal. Dalam kasus ini, *underground economy* menjadi saluran yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*).

Kedua, efek positif yang mungkin ditimbulkan *underground economy* adalah penyediaan lapangan kerja, hal ini dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat. Perusahaan dalam *underground economy* mempunyai struktur biaya yang lebih rendah dari *official economy*, jadi permintaan akan tenaga kerja dapat lebih besar. Di sisi lain kesejahteraan konsumen dapat meningkat karena harga yang lebih rendah, yang berakibat pada peningkatan daya beli masyarakat.

2.4. Metode Pengukuran *Underground Economy*

Sangat sulit untuk mengukur secara tepat aktivitas *underground economy*. Beberapa ekonom menggunakan metode pendekatan yang belum tentu sama satu dengan yang lain, baik dari cara perhitungan maupun asumsi-asumsi dasar yang dibangun. Schneider & Enste, (2000) dan Tanzi, (2002) memberikan beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai *underground economy*, sebagai berikut.

- 1) Pendekatan langsung (*direct approaches*), berupa survei terhadap pelaku kegiatan yang masuk kategori *underground economy*, dan melalui audit pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan .
- 2) Pendekatan moneter, yang dilakukan dengan menganalisis sensitivitas permintaan uang kartal terhadap adanya faktor pendorong munculnya *underground economy* (salah satunya adalah beban pajak). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan *underground economy* lebih cenderung dilakukan menggunakan uang tunai dalam transaksi keuangan karena hal ini tidak mudah dilacak dibandingkan transaksi yang melibatkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.
- 3) Pendekatan diskrepansi dalam *official statistic*, yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah pengeluaran dan pendapatan dalam neraca nasional. Selain itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja.

- 4) Pendekatan konsumsi listrik. Pertumbuhan konsumsi listrik yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi (aktivitas perekonomian), juga dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan *underground economy*.

2.5. Kajian Variabel Penelitian

2.5.1. Permintaan Uang

Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang dapat dibedakan atas teori klasik dan teori Keynesian.

2.5.1.1. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang klasik diantaranya diwakili oleh teori moneter Irving Fisher yang disebut teori kuantitas uang. Teori ini berpandangan bahwa uang hanya sebagai alat tukar, maka uang akan berputar atau berpindah-pindah tangan dari satu pihak kepada pihak lainnya (*velocity*) selama suatu periode tertentu. Faktor yang memengaruhi velositas uang adalah faktor kelembagaan, utamanya mekanisme pembayaran yang digunakan (tunai atau cek). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan jumlah velositasnya (V) akan sama dengan jumlah produksi (T) dikalikan dengan harga jualnya (P), atau $MV = PT$. Karena output yang dihasilkan (T) adalah output pada kesempatan kerja penuh dan velositas uang (V) diasumsikan konstan, maka dalam jangka pendek jika M berubah, maka P juga berubah. Konsekuensinya adalah perubahan P karena perubahan M mempunyai hubungan searah dan proporsional.

2.5.1.2. Teori Permintaan Uang Keynes

John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of*

Employment, Interest, and Money, menolak anggapan ekonom Klasik yang menyatakan bahwa velositas uang (*velocity of money*) adalah konstan. Menurut Keynes, motif permintaan uang didorong oleh tiga hal, yaitu : (i) motif transaksi (*transactions motive*) (ii) motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan (iii) motif spekulasi (*speculative motive*).

Permintaan uang menurut Keynes merupakan permintaan uang riil atau disebut juga *liquidity preference function*, dimana permintaan uang riil (*real money balance*, M_d/P) ditentukan oleh pendapatan riil (Y) dan *opportunity cost* (r). Velositas uang (V) tidak konstan tetapi berfluktuasi seiring dengan pergerakan tingkat bunga. Berdasarkan fungsi preferensi likuiditas diketahui bahwa permintaan uang berhubungan negatif dengan tingkat bunga (r). Ketika r naik, permintaan uang turun, oleh karena itu *velocity of money* juga naik. Dengan kata lain, kenaikan tingkat bunga mendorong masyarakat untuk memegang *real money balance* lebih sedikit pada tingkat pendapatan yang tetap, sehingga tingkat perputaran uang menjadi lebih tinggi. Hal ini secara implisit mengindikasikan bahwa tingkat bunga memainkan peranan yang penting dalam memengaruhi tingkat perputaran uang.

Model permintaan uang spekulasi Keynes juga dapat menjelaskan fluktuasi perputaran uang. Ketika di masa yang akan datang tingkat bunga diharapkan lebih tinggi, maka harga obligasi turun dan pemegang obligasi mengalami *capital loss*. Dengan demikian, memegang uang akan menjadi lebih menarik daripada memegang obligasi, akibatnya jumlah permintaan uang akan naik dan *velocity of money* turun. *Velocity of money* akan berubah apabila

ekspektasi tingkat bunga nominal di masa yang akan datang berubah dan ketidakstabilan ekspektasi tersebut akan menyebabkan *velocity of money* menjadi tidak stabil pula.

2.5.1.3. Teori Transaksi dari Permintaan Uang

Teori permintaan uang yang menekankan peran uang sebagai media pertukaran disebut teori transaksi (*transaction theories*). Teori ini menyatakan bahwa uang adalah aset yang didominasi dan menekankan bahwa orang memegang uang, tidak seperti aset-aset lainnya, untuk melakukan pembelian. Teori ini menjelaskan dengan sangat baik mengapa orang memegang ukuran uang yang sempit, seperti uang tunai, sebagai lawan dari memegang aset yang mendominasi mereka, seperti rekening tabungan atau deposito.

Teori transaksi dari permintaan uang memiliki berbagai bentuk, yang bergantung pada bagaimana orang memodelkan proses menghasilkan uang dan melakukan transaksi. Seluruh teori ini mengasumsikan bahwa uang mempunyai biaya dari menerima tingkat pengembalian yang rendah dan manfaat yang membuat transaksi lebih aman. Orang-orang memutuskan berapa banyak uang yang akan dipegang dengan menghadapi *trade-off* biaya dan manfaat ini.

2.5.2. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) didefinisikan sebagai nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu, Menurut Mankiw, (2007) ada dua cara untuk melihat statistik PDB, yaitu dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan melihat PDB sebagai pengeluaran total atas output barang dan

jasa perekonomian. Untuk perekonomian secara keseluruhan, jumlah pendapatan harus sama dengan pengeluaran karena setiap transaksi memiliki pembeli dan penjual, maka setiap rupiah yang dikeluarkan seorang pembeli harus menjadi pendapatan penjual.

PDB seringkali dijadikan sebagai indikator tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran (*welfare*) di suatu negara. Namun demikian, menurut Mankiw, (2007) PDB bukan merupakan ukuran yang sempurna untuk kesejahteraan ekonomi, karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Perhitungan PDB mengabaikan pengurangan sumber daya dan lingkungan
- 2) Tidak memperhatikan adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (*income inequality*), PDB memasukkan sejumlah item yang jelas tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi (misalnya, perbaikan kerusakan akibat topan menambah PDB) dan mengecualikan item lain yang jelas memberikan kontribusi seperti kerja sukarela dan kerja rumah tangga (orang tua yang mengajarkan anak-anaknya membaca; upah pembantu; dan petani yang langsung menjual produk ke pasar);
- 3) Tidak memasukkan kegiatan yang bersifat non-material, karena PDB hanya menghitung output yang dianggap memnuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur dengan nilai uang, misalnya ketenangan hidup karena menyandarkan hidup pada norma agama
- 4) Mengabaikan kegiatan ekonomi yang tersembunyi (*underground economy*), yang meliputi semua pendapatan yang tidak dilaporkan dari sumber-sumber resmi dan sumber-sumber yang ilegal. Munculnya *underground economy*

mengakibatkan hasil perhitungan PDB menjadi bias. Semakin besar *underground economy* maka bias perhitungan PDB semakin besar dan hasil perhitungan itu tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya.

2.5.3. Opportunity Cost

BI 7-Day RepoRate diasumsikan sebagai *opportunity cost* dari memegang uang. Boedjono, (2014) tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar, Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara resmi melalui media massa dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarakan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas dirumah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarakan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat resiko lebih besar.

2.5.4. Inflasi

Menurut Suparmoko, (2000) Inflasi adalah keadaan dimana terdapat kenaikan harga umum secara terus menerus, bukan kenaikan atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan juga bukan hanya terjadi satu atau dua kali kenaikan harga, tetapi berlanjut.

Mishkin, (2001) menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai *sustained inflation* atau inflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka baik ekonom aliran moneter maupun ekonom aliran Keynesian sependapat bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter. Untuk membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter tokoh ekonom Milton Friedman telah menguji bahwa dalam jangka panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi.

Menurut Suparmoko, (2020) banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan. Inflasi yang ringan dapat mendorong perekonomian lebih baik yaitu melalui peningkatan pendapatan nasional sehingga membuat orang bergairah untuk menabung, maupun kegiatan investasi. Sementara jika terjadi inflasi yang tinggi, keadaan perekonomian akan menjadi lesu sehingga orang tidak bersemangat untuk bekerja, menabung, berproduksi, maupun investasi.

2.5.5. Inovasi Keuangan

Menurut Tufano, (2003) inovasi keuangan adalah suatu perbuatan untuk menciptakan dan kemudian mempromosikan suatu instrumen keuangan baru serta teknologi keuangan baru lembaga dan pasar atau berkaitan dengan penciptaan jenis baru dari suatu perusahaan keuangan. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan pasar, menunjukkan *agency concerns* dan *information asymmetries*, meminimalkan *transaction cost*, merespon pajak atau regulasi, dan stimulasi dengan *technological shocks*.

2.5.6. Beban Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu kontributor utama dalam penyumbang pendapatan negara di APBN. Kemampuan negara mengumpulkan pajak dapat dilihat pada *tax ratio*. Referensi OECD dan *Government Financial Statistic Manual* (GFSM) menjadi rujukan internasional dari segi cakupan, komponen pajak, dan struktur pajak. Pemerintah Indonesia sendiri mendefinisikan *tax ratio* dalam dua arti, yakni arti sempit dan arti luas. Arti sempit pada awalnya hanya terdiri dari pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat semata, tetapi pada tahun 2015 dilebarkan cakupan dengan pajak daerah. Sedangkan untuk arti luas, pada tahun sebelumnya terdiri dari pajak pemerintah pusat ditambah pajak daerah dan PNB

SDA Migas, tetapi pada tahun 2015 diubah dengan Pajak Pemerintah Pusat, PNBPN SDA migas, serta PNBPN Mineral dan Batubara (minerba).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengukuran besaran *underground economy* dan kaitannya dengan potensi penerimaan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian Samuda, (2016) mengestimasi besarnya nilai *underground economy* di Indonesia selama tahun 2001-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut 11172,864 miliar hilang setiap triwulannya akibat aktivitas *underground economy*.

Penelitian Ramadhan, (2019) dengan metode OLS memperkirakan ukuran *underground economy* dan potensi penerimaan pajak di era *tax amnesty* Indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ukuran *underground economy* di Indonesia mencapai 528 triliun rupiah dan rata-rata potensi kerugian pajak setiap tahunnya sekitar 56,23 triliun rupiah, dan rata-rata potensi kerugian pajak terhadap PDB adalah 0,95%.

Penelitian Mulyawan, (2017) dengan menggunakan metode OLS mengestimasi nilai *underground economy* di Indonesia periode 2011-2015, hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah uang kartal yang digunakan dalam kegiatan *underground economy* sebesar 525,06 triliun per triwulan atau setara dengan 15,8% dari total jumlah uang kartal yang beredar dalam masyarakat. Selanjutnya Mulyawan, (2017) melalui hasil perhitungan mendapatkan nilai *underground economy* berkisar antara 289-958 triliun dengan nilai rata-rata mencapai 536 triliun per tahun atau setara dengan 22,1% terhadap PDB Nominal

dan potensi penerimaan pajak berkisar 23,32 triliun hingga 1467 triliun dengan rata-rata 487,12 triliun.

Penelitian Anggraeni, (2021) mengestimasi besaran potensi kehilangan pajak *underground economy* dan menemukan selama periode 2010-2017 menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan varias pendapatan yang dihitung dari selisih antara target penerimaan negara dari sektor pajak dengan realisasi penerimaan pajak, menunjukkan kecenderungan fluktuatif yakni sebesar 33,82 triliun hingga 92,50 triliun pada tahun 2010 dan sebesar 162,22 triliun hingga 180,91 triliun pada tahun 2017 dengan metode pendekatan kuantitatif sedangkan dengan metode varians pendapatan menunjukkan potensi sebesar 33,61 triliun pada tahun 2010 dan 132,54 triliun pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak menggunakan kedua metode tersebut yang disebabkan oleh setiap regulasi perpajakan yang diterbitkan pemerintah ditinjau dari respon pelaku *underground economy* maupun realisasi pajak yang tercapai pada tahun berjalan.

Penelitian di luar Indonesia dilakukan oleh Amoh & Adafula, (2019) menggunakan metode yang berbeda yaitu metode ARDL mengestimasi ukuran *underground economy* dan *tax evasion* di Ghana dengan data tahunan dari 1990-2015 menemukan bahwa ukuran *underground economy* di Ghana selama periode tersebut berkisar 264,02-169.066,82 dengan *tax evasion* sebesar 14,86 persen pada tahun 1990 dan meningkat pada tahun 2000 menjadi 20,35 persen.

Penelitian di luar Indonesia juga dilakukan oleh Oprean, (2021) dilakukan di negara Rumania, dalam hasil penelitian mendapatkan bahwa potensi penerimaan pajak yang muncul dari *underground economy* atau biasa disebut dengan *tax evasion* di Rumania selama periode 2014-2019 berkisar dari 34,3% sampai 40,60% selama periode tersebut.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Permintaan Uang Kartal

Berdasarkan teori yang dikemukakan Keynes, pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan permintaan uang. Dalam penelitian ini, pendapatan diwakili oleh PDB nominal. Produk domestik bruto merupakan ukuran tingkat kegiatan ekonomi suatu negara, namun demikian produk domestik bruto bukanlah merupakan indeks atau pengukur kesejahteraan yang memuaskan, meskipun demikian perlu memasukan variabel pendapatan dalam analisis jumlah uang beredar, karena memiliki prinsip dasar yang sama yaitu tindakan memilih dari individu sebagai pemilik kekayaan. Masyarakat yang pendapatannya tinggi akan mendorong bank-bank umum untuk meningkatkan pemberian jaminan kredit pinjaman kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar meningkat.

Dalam jangka panjang produk domestik bruto dapat mempengaruhi jumlah uang beredar untuk dapat menghitung kenaikan tersebut dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga barang-barang yang berlaku pada satu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Boedjono, (2014) pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Implikasi dari teori Fisher bahwa jumlah uang beredar di dalam masyarakat merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan pula dari tingkat output masyarakat (pendapatan nasional). Jadi jumlah uang pada analisa akhir ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional saja.

2.8.2. Pengaruh *Opportunity Cost* Terhadap Permintaan Uang Kartal

Variabel *Opportunity cost* dalam penelitian ini diwakili oleh tingkat suku bunga yang merupakan *opportunity cost* dari memegang uang. Suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah uang beredar. Apabila suku bunga meningkat, maka jumlah uang beredar akan menurun, dan sebaliknya. Proses ini bekerja dari pengertian tingkat bunga dalam asumsi klasik, yang menganggap bahwa uang adalah produktif dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketika suku bunga tinggi, maka masyarakat akan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan sehingga jumlah uang beredar akan turun, dan sebaliknya, ketika suku bunga rendah, maka masyarakat tidak tertarik untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar bertambah.

2.8.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan Uang Kartal

Permintaan uang riil adalah permintaan terhadap uang kartal yang dihubungkan dengan perubahan harga barang dan jasa secara umum yang memengaruhi daya beli uang (*purchasing power of money*). Apabila terjadi inflasi yang tinggi maka jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit atau dengan kata lain daya beli uang menjadi menurun. Oleh karena itu, secara teori hubungan antara permintaan uang kartal dengan inflasi adalah negatif. Hal ini dikarenakan ketika inflasi meningkat maka terjadi efek pengurangan daya beli, daya beli uang tunai individu dapat tergerus. Selain itu jika inflasi tinggi maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada mata uang dan beralih ke asset non-moneter yang lebih stabil.

2.8.4. Pengaruh Inovasi Keuangan Terhadap Permintaan Uang Kartal

Variabel inovasi keuangan dan perkembangan perbankan ditunjukkan oleh jumlah kantor cabang Bank Umum. Variabel ini merepresentasikan pelayanan perbankan. Semakin banyak jumlah kantor cabang bank maka layanan perbankan semakin baik. Jumlah pelayanan yang semakin banyak akan mengurangi biaya untuk memegang uang, yang pada gilirannya juga akan menyebabkan berkurangnya permintaan atas uang. Hal ini sesuai dengan teori permintaan uang untuk transaksi Baumol-Tobin, yang menyatakan bahwa perkembangan jasa perbankan akan mengurangi biaya total untuk memegang uang, yang pada akhirnya menyebabkan permintaan terhadap uang kartal turun.

Model Baumol-Tobin menganalisis biaya dan manfaat dari memegang uang. Manfaatnya adalah kenyamanan, orang-orang memegang uang agar tidak

perlu pergi ke bank setiap kali mereka ingin membeli sesuatu, biaya kenyamanan ini adalah hilangnya bunga yang akan mereka terima jika uang itu mereka simpan di bank yang akan menghasilkan bunga. Implikasi lainnya adalah bahwa setiap perubahan biaya pergi ke bank (F) mengubah fungsi permintaan uang, yaitu mengubah kuantitas uang yang diminta pada setiap tingkat bunga dan pendapatan tertentu, artinya semakin banyaknya kantor cabang bank maupun semakin banyaknya jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) membuat kenyamanan orang untuk memegang uang menjadi semakin kecil karena biaya kenyamanan menjadi semakin kecil.

2.8.5. Pengaruh Beban Pajak Terhadap Permintaan Uang Kartal.

Variabel beban pajak merupakan variabel penting dalam menentukan besaran aktivitas *underground economy*. Menurut Tanzi, (2002) penggunaan uang kartal sebagai alat transaksi lebih memudahkan para pelaku *underground economy* untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Beban pajak berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas *underground economy*, dimana semakin tinggi beban pajak semakin besar pula aktivitas *underground economy*. Pajak dapat berpengaruh positif terhadap permintaan uang kartal karena adanya motivasi untuk menghindari pajak, yaitu dengan menggunakan uang kartal yang lebih banyak karena pada penggunaan uang kartal tidak mudah dilacak dibandingkan transaksi yang melibatkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah dimulai dari hipotesis kemudian melakukan analisis regresi, menentukan pendugaan model, melakukan estimasi,

melakukan analisis hasil estimasi. Atas analisis hasil estimasi ditentukan estimasi permintaan uang kartal, estimasi uang kartal menjadi dasar penentuan estimasi nilai *underground economy*, kemudian menentukan estimasi nilai *potential loss* penerimaan pajak. Bagan kerangka pemikiran penelitian disajikan sebagai berikut:



Sumber: Samuda, (2016)

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir